

Jejaring Kekuasaan Komunitas: Studi Kasus Eksistensi PKL Non-Resmi di Jalan Tentara Genie Pelajar

Indira Paramita Citra Murti*

ABSTRAK

Dinamika kepentingan dalam kasus PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar ternyata memiliki hubungan ketergantungan antara jejaring sosial, ekonomi dan politik. Dalam kasus eksistensi PKL non-resmi di Jalan Tentara Genie Pelajar, kerjasama adalah hal yang diutamakan karena untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Dengan adanya jejaring sosial, ekonomi dan politik dirasa sudah menguntungkan PKL untuk dapat bertahan di Jalan Tentara Genie Pelajar.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana karakteristik sosial ekonomi komunitas PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar. Peneliti juga melihat bagaimana kepentingan pemerintah Kota Surabaya terhadap komunitas PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar, serta bagaimana hubungan antara komunitas PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar dengan jejaring politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menjelaskan tentang bagaimana dinamika kepentingan antara aparat pemerintah dengan PKL, serta bagaimana jejaring politik terjadi dan mengakibatkan eksisnya PKL non-resmi di Jalan tentara genie pelajar.

Solidaritas PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar terbentuk karena adanya kepentingan ekonomi dan sosial antara PKL, aparat pemerintah dan preman. Dilema akomodasi antara kepentingan PKL dan Pemerintah mengakibatkan aparat pemerintah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepentingan yang berbeda antara PKL dan pemerintah menjadikan aparat pemerintah berada di posisi yang strategis. Kepentingan PKL yang kuat menyebabkan PKL memiliki hubungan simbiosis mutualistik dengan preman dan pemerintah.

Keyword: Struktur sosial ekonomi, PKL, Pemerintahan, Kelompok kepentingan

Abstract

The dynamics of interest in the case of street vendors on Jalan Tentara Genie Pelajar appeared to have dependency relationship between social networks, economic and political. In the case of the existence of non-authorized vendors on Jalan Tentara Genie Pelajar, cooperation is a priority due to meet the interests of each sides relevant. With a network of social, economic and political benefit street vendors to prove it can survive on Jalan Tentara Genie Pleajar

This research discusses how the socio-economic characteristics of the community of street vendors on Jalan Tentara Genie Pelajar. Researchers also looked at how the interests of the Government of the city of Surabaya against street vendors in the community of Jalan Tentara Genie Pelajar, and how Student connections between communities of Street vendors on Jalan Tentara Genie Pelajar of political networking . This research uses qualitative research methods. Researchers explain how the dynamics of interest between the Government apparatus with street vendors, as well as how the political networking occurred and resulted in the non-official eksisnya street vendors on the street soldier genie students.

Street vendors in the solidarity of soldiers formed due to Student Genie economic interests and social between street vendors, government agencies and thugs. The dilemma of accommodation between street vendors and government interests resulted in the Government apparatus is not doing their job properly. Different interests between street vendors and Governments made the Government apparatus is in a strategic position. The interests of a strong lead from street vendors have relationships with thugs and simbiosis mutualistik Government

Keyword: The social structure of economy, street vendors, government, interest groups

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: Mita_cappucino@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi kota selalu bisa menarik banyak penduduk di perdesaan untuk hijrah dan mengadu nasib. Keadaan ini menjadi beban tersendiri bagi wilayah perkotaan, dimana urbanisasi terjadi terus-menerus sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia di kota minim dan kemampuan para pendatang kurang memadai. Beban kota semakin meningkat manakala terjadi krisis ekonomi dan moneter di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi memang awalnya dirasakan begitu berat oleh masyarakat karena masyarakat yang selalu bergantung pada sektor formal, namun lambat laun sebagian besar masyarakat beralih pada sektor informal. Sektor ini memungkinkan masyarakat menciptakan peluang dan memanfaatkan celah perekonomian yang mudah dimasuki dan tidak membutuhkan modal yang besar.

Salah satu jenis pekerjaan dalam sektor informal yang banyak diminati oleh para pendatang adalah pedagang kaki lima (PKL). Jumlah PKL di Surabaya pada tahun 2006 adalah sebesar 24.862 orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebanyak 25.831 orang. (kompas, 14 Januari 2010). Para PKL tersebar di hampir di seluruh wilayah perkotaan. PKL umumnya tidak memiliki tempat berjualan yang dilegalkan oleh pemerintah kota. PKL biasanya menempati area-area publik, seperti trotoar, jalan, dan saluran air. Keadaan PKL yang semakin meningkat dan dianggap mengganggu keindahan kota, membuat Pemerintah kota Surabaya ingin memberdayakan PKL. Pemerintah Kota Surabaya kemudian mengeluarkan Perda Nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Namun, tidak semua PKL di Surabaya mampu dibina oleh Pemerintah Kota, sehingga memunculkan PKL non-resmi.

PKL non-resmi salah satunya PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar. PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar merupakan PKL non-resmi yang sudah ada sejak tahun 1970-an, meskipun merupakan PKL non-resmi PKL-PKL ini dapat bertahan sampai sekarang. Adanya penertiban dua kali saat orde baru dan tahun 2008 kurang berpengaruh terhadap PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar. Ini dikarenakan adanya kepentingan, kerjasama dan hubungan ketergantungan antara aparat pemerintah, PKL dan preman. Dari kepentingan, kerjasama

dan hubungan ketergantungan, mengakibatkan PKL non-resmi di Jalan Tentara Genie Pelajar eksis hingga sekarang.

KERANGKA TEORITIK

Menurut Suzzane Keller, Eksistensi dan bertahanya minoritas-minoritas yang berpengaruh adalah salah satu ciri tetap dalam kehidupan sosial yang teratur. (Keller, 1984). Elit menunjukan kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab efektif dalam pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain. (Keller, 1984). Golongan elit mempunyai arti secara sosial yaitu bertanggung jawab untuk realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tatanan sosial. (Keller, 1984). Kelanjutan, sebagaimana digunakan disini, mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup, maka ia mencakup juga kemungkinan tatanan sosial akan runtuh.

Elit umumnya dianggap kecil jumlahnya dalam hubungan dengan seluruh penduduk. Golongan elit adalah juga minoritas dalam hal lain, meskipun tidak selalu secara eksplisit posisi yang mereka duduki ini merupakan hal yang paling penting atau yang merupakan sentral, sifat-sifat yang menjadi dasar pemilihan terhadap mereka memiliki atau tampaknya memiliki semacam keunggulan, tanggungjawab sosial mereka ;memiliki tanggung jawab yang besar melebihi penduduk, Imbalan mereka:memperoleh bagian yang lebih banyak dalam hal-hal kebaikan hidup. (Keller, 1984: 110) . Golongan elit berkembang disebabkan oleh empat proses sosial yang utama yakni pertumbuhan penduduk, pertumbuhan spesialisasi jabatan, pertumbuhan organisasi, perkembangan keragaman moral. (Keller, 1984: 91)

Elit penentu berbeda dari elit-elit politik yang lain karena elit penentu dapat terpisah dari kekuasaan yang mana dapat menjadikannya suatu titik pusat kolektif untuk harapan dan keluhan kolektif. (Keller, 1984). Hubungan dari elit penentu dan massa menghendaki penghormatan dan simpati timbale balik. (Keller, 1984: 394). Tetapi tidak pula ia menghilangkan jarak dan keperluan sikap yang bisa

menumbuhkan apresiasi wajar tentang perbedaan-perbedaan mereka dalam tanggungjawab dan kekuasaan. (Keller, 1984: 394)

Solidaritas Komunitas PKL

PKL adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya (<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-14164-chapter1pdf.pdf> diakses tanggal 9 november 2012). Jalan Tentara Genie Pelajar merupakan tempat yang strategis, depan sekolahan dan perumahan warga merupakan perputaran ekonomi yang menguntungkan untuk para PKL. PKL di jalan tentara genie pelajar sudah ada sejak tahun 1970-an. PKL-PKL di jalan tentara genie pelajar mayoritas merupakan PKL yang berasal dari luar daerah Surabaya, salah satunya berasal dari Madura. Perumahan warga dan depan sekolahan merupakan pilihan yang tepat untuk para pedagang kaki lima berjualan di jalan tentara genie pelajar. Namun, tempat strategis yang dipilih ternyata ada yang menguasai yakni preman. Jika ingin berdagang PKL diharuskan untuk izin terlebih dahulu kepada preman. Preman dan PKL merupakan masyarakat yang berasal dari daerah yang sama yakni madura sehingga izin yang diberikan pun mudah. Preman yang merasa diuntungkan dengan adanya PKL-PKL yang bermunculan, akhirnya mengundang teman atau saudaranya yang sederhana untuk berdagang menjadi PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar. Tidak hanya preman, PKL yang telah berdagang juga mengundang teman dan saudara mereka yang sederhana untuk menjadi PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar.

Lambat laun perkembangan PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar semakin semerawut sehingga mengakibatkan kemacetan. Melihat kemacetan yang terjadi, petugas smkn 2 melaporkan kejadian perkembangan PKL kepada pihak kepolisian. Tidak lama setelah adanya laporan tersebut, pihak kepolisian menertibkan PKL-PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar yang mayoritas merupakan PKL las. Setelah penertiban yang dilakukan oleh kepolisian, beberapa dari PKL las, PKL makanan, PKL minuman dan PKL penjahit

kembali di Jalan Tentara Genie Pelajar.

Tahun 1997/1998 terjadi krisis moneter yang menggemparkan Indonesia. Akibat dari krisis moneter banyak masyarakat yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya dikarenakan perusahaan mereka bekerja bangkrut. Pengangguran terjadi dimana-mana, sektor informal menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sektor informal yang masyarakat pilih adalah dengan menjadi pedagang kaki lima. Lokasi berdagang yang mereka pilih di Jalan Tentara Genie Pelajar. PKL baru ini adalah PKL ikan hias. PKL ikan hias saat krisis moneter hanya sedikit dengan seiring berkembangnya zaman PKL ikan hias semakin banyak. Preman setempat yang berasal dari Madura mengajak teman dan saudaranya untuk berjualan di jalan tentara genie pelajar dengan menjadi PKL ikan hias. Meskipun PKL ikan hias yang berasal dari madura bukan mayoritas tetapi masih tetap ada unsur sederhana antara PKL ikan hias dan preman. Tahun 2004 PKL ikan hias semakin hari semakin bertambah. Bertambahnya PKL ikan hias dikarenakan banyak masyarakat yang melihat bahwa berdagang menjadi PKL di jalan tentara genie pelajar merupakan PKL yang memiliki banyak keuntungan, sehingga banyak yang berdagang menjadi PKL ikan hias. Selain itu, karena banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan maka PKL di jalan tentara genie pelajar mengajak teman mereka yang bukan sederhana tetapi mengajak teman yang sama-sama tidak memiliki pekerjaan. Ajakan-ajakan yang dilakukan antar PKL ikan hias satu dengan PKL ikan hias lainnya. Dengan seijin preman setempat akhirnya PKL-PKL ikan hias ini semakin berkembang.

Tahun 2003 pemerintah kota Surabaya mengeluarkan Perda nomor 17 tahun 2003 yang berisi tentang pemberdayaan dan penataan PKL. Sejak dikeluarkan Perda nomor 17 tahun 2003, PKL di jalan tentara genie pelajar, PKL di jalan tidar dan PKL di jalan kalibutih membentuk kepengurusan yang beranggotakan PKL-PKL di jalan tidar, tentara genie pelajar dan kalibutih dan anggota yang sukarela membantu para PKL. Kepengurusan ini ditujukan untuk memperoleh perlindungan dari aparat pemerintah kota Surabaya. Ketika kepengurusan ini mencari perlindungan, mereka bekerjasama dengan oknum Dinas Koperasi dan UMKM yang sederhana dengan mayoritas PKL di jalan tentara

genie pelajar, tidar dan kalibutuh yakni Madura.

Berkembangnya PKL ikan hias yang berada di depan SMKN 2 membuat guru dan pengurus sekolah tidak tinggal diam. Mereka melaporkan kembali kepada lurah petemon dan camat sawahan. Setelah adanya laporan tersebut dari pihak kecamatan meminta bantuan kepada satpol pp kotamadya Surabaya untuk menertibkan PKL ikan hias. Pada april tahun 2008 PKL ikan hias di jalan tentara genie pelajar ditertibkan dan diberi solusi untuk berdagang di gunungsari. Gunungsari adalah tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya khusus untuk PKL ikan hias. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya di jalan tentara genie pelajar adalah untuk menertibkan PKL ikan hias dan tidak menertibkan PKL makanan-minuman dan PKL penjahit

Setelah terjadi penertiban yang dikhususkan untuk PKL ikan hias, PKL penjahit, PKL makanan-minuman kembali berjualan di jalan tentara genie pelajar. PKL penjahit yang berasal dari Madura yang telah ada sejak tahun 1970-an mengajak teman dan saudara mereka yang berasal dari Madura untuk berdagang di jalan tentara genie pelajar. Selain PKL penjahit yang mengajak teman dan saudara mereka untuk berdagang di jalan tentara genie pelajar. Setelah diajak oleh preman dan PKL pertama yang ada di jalan tentara genie pelajar, saudara dan teman mereka yang memiliki kemampuan menjahit akhirnya menjadi PKL penjahit di jalan tentara genie pelajar. Selain PKL penjahit, PKL makanan, minuman dan ikan hias saling mengajak teman mereka untuk berjualan di jalan tentara genie pelajar mulai menjadi PKL makanan, minuman, atau ikan hias.

Jejaring Ekonomi antar anggota komunitas PKL Ekonomi adalah faktor yang penting bagi kehidupan manusia tidak terkecuali PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar. PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus dapat mempertahankan lapak dagangannya. Mempertahankan lapak dagangan dengan memperjuangkan sendiri merupakan suatu hal yang mustahil. Karena dibutuhkan jejaring-jejaring untuk dapat mempertahankan lapak dagangan. Salah satunya dibutuhkan jejaring ekonomi. Dimana jejaring ekonomi ini didapatkan dengan cara PKL membayar setiap bulannya.

Saat orde baru jejaring ekonomi PKL las, makanan, minuman dan penjahit di Jalan Tentara Genie Pelajar adalah preman dan lurah petemon ini dilakukan secara otomatis. Sedangkan sesudah di keluarkannya Perda nomor 17 tahun 2003 jejaring ekonomi PKL ikan hias, makanan, minuman dan penjahit di Jalan Tentara Genie Pelajar adalah preman, oknum dinas koperasi dan umkm, oknum petugas satpol pp. Untuk mendapatkan perlindungan dari oknum dinas koperasi dan umkm, oknum petugas satpol pp dibentuk kepengurusan PKL. Kepengurusan PKL berjuang agar mendapatkan perlindungan ternyata memiliki hubungan dengan preman. Dimana preman memberikan solusi agar kepengurusan PKL ke dinas koperasi dan umkm. Preman dan kepengurusan PKL merupakan elit penentu dimana preman dapat ke PKL dan mencapai kepengurusan PKL. Sedangkan kepengurusan PKL dapat menjangkau oknum dinas kopersi dan umkm, oknum satpol pp, kemudian bisa menjangkau PKL.

Tahun 2008 hingga kini PKL penjahit, makanan dan minuman masih tetap membayar kepada oknum petugas satpol pp, tetapi yang baru-baru ini PKL tidak lagi membayar kepada preman dikarenakan telah meninggal dunia.

Cara memperoleh jaminan keamanan antar anggota komunitas PKL Ijin, keamanan dan pemberitahuan sebelum adanya penertiban merupakan perlindungan yang diberikan oleh lurah petemon dan preman secara otomatis, sehingga PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar langsung membayar berupa uang kepada lurah petemon dan preman setiap bulan. Perlindungan yang diberikan oleh lurah petemon hanya sampai orde baru saja, sedangkan preman masih bertahan hingga tahun 2000-an.

Setelah dikeluarkannya Perda nomor 17 tahun 2003, PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar, Tidar dan Kalibutih memperjuangkan nasib PKL dengan cara membuat kepengurusan. Kepengurusan ini berfungsi memperjuangkan nasib PKL yang dilarang berjualan difasilitas umum. Dari perjuangan yang dilakukan oleh kepengurusan PKL akhirnya mereka mendapatkan perlindungan dari oknum dinas koperasi dan umkm, dan oknum petugas satpol pp. Perlindungan yang diberikan oleh oknum dinas koperasi dan umkm adalah dengan

memberi keamanan kepada PKL dengan syarat PKL harus membayar kepadanya sebaris PKL satu juta per bulan. Sedangkan perlindungan yang ditawarkan oleh oknum petugas satpol pp adalah ijin berdagang dan jika ada penertiban maka beberapa hari sebelumnya PKL akan diberitahu terlebih dahulu, PKL di haruskan membayar perlindungan sebulan sekali dari masing-masing PKL.

Setelah adanya penertiban tahun 2008, PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar tidak lagi membayar dan mendapat perlindungan dari oknum dinas koperasi dan umkm karena kepengurusan PKL bubar. Sehingga tahun 2008 hanya membayar kepada preman dan oknum petugas satpol pp. Dan mendekati tahun 2012 preman-preman di Jalan Tentara Genie Pelajar meninggal sehingga sekarang PKL hanya membayar dan mendapatkan perlindungan dari oknum petugas satpol pp.

Dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh PKL kepada preman dan oknum aparat pemerintah merupakan hal yang wajar di wilayah perkotaan. Struktur sosial ekonomi perkotaan mendorong masyarakat miskin untuk memiliki hubungan patron klien. (Nelson, 1979) Hubungan patron klien merupakan hubungan yang dapat dibangun untuk kaum miskin kota dengan para penguasa. (Nelson, 1979). Dukungan politik dipertukarkan dalam hubungan patron-klien untuk membantu dalam memecahkan masalah-masalah. (Nelson, 1979). Rasa hormat penghargaan, perlindungan, takut merupakan partisipasi vertikal dari sudut pandang politik yang lebih luas. (Nelson, 1979)

Dilema akomodasi kepentingan PKL dengan pemerintah

PKL di Surabaya dari tahun ke tahun semakin meningkat dan semakin tidak tertata. PKL di Surabaya yang telah menjamur di fasilitas umum dan mengganggu keindahan kota Surabaya mengakibatkan pemerintah kota Surabaya ingin mengatur dan memberdayakan PKL tersebut. Dengan adanya keinginan mengatur dan memberdayakan PKL, pemerintah kota Surabaya mengeluarkan Perda nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam perda nomor 17 tahun 2003 terdapat kewenangan pemerintah kota Surabaya yang lebih mencolok. Oleh karena itu, kebijakan ini cenderung sebagai kebijakan yang

kontraproduktif dan cenderung sepihak.

Kewenangan pemerintah kota Surabaya antara lain menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL, melarang penggunaan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL. Dalam hal ini pemerintah kota Surabaya melarang adanya PKL berjualan di fasilitas umum, jika PKL-PKL berdagang di fasilitas umum maka pemerintah kota berhak untuk merelokasi para pedagang kaki lima di tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya. Pemindahan atau relokasi pada daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya belum tentu sesuai dengan yang diinginkan oleh PKL. Kemudian jika direlokasi pemerintah yang berwenang menetapkan dan mengatur kegiatan usaha PKL, menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL, menetapkan jenis barang yang diperdagangkan, mengatur alat peraga PKL. Selain itu untuk mendapatkan kartu daftar usaha juga memiliki syarat yang banyak dan jangka waktu yang diberikan untuk tanda daftar usaha dilakukan selama enam bulan dan dapat di perpanjang. Dan adanya sanksi pidana yang dinilai tidak memihak PKL inilah yang menyebabkan penanganan dan penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemkot kurang dapat memberikan jalan keluar bagi PKL di Surabaya.

Struktur pemerintahan khusus menangani PKL

Sesuai dengan keputusan walikota Surabaya nomor 17 tahun 2004 menyebutkan bahwa camat, satuan polisi pamong praja dan dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah memiliki wewenang untuk menata dan memberdayakan PKL. Camat memiliki kewenangan yakni memberikan peringatan pertama, kedua untuk melaksanakan pertaturan daerah kepada PKL, mengusulkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM untuk mencabut tanda daftar usaha PKL, merekomendasikan lokasi PKL yang akan direlokasi. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang seperti memberikan peringatan kepada PKL yang bersangkutan untuk membongkar atau memindahkan sarang usaha atau mengeluarkan sendiri barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari lokasi PKL, melakukan pembongkaran sarana usaha atau mengeluarkan barang dagangan PKL dan melakukan penyidikan dalam rangka pengenaan sanksi pidana. Dinas koperasi dan umkm memiliki tugas

memberdayakan PKL dengan melakukan pembinaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan PKL. Camat, satpol pp dan dinas koperasi dan umkm merupakan elit yang bertanggungjawab untuk tujuan sosial dan untuk kelanjutan tatanan sosial yang dianggap efektif dalam pelaksanaan kegiatan kepentingan kepada masyarakat. (Keller, 1984)

Pelaksanaan Fungsi

Sebelum adanya perda yang mengatur tentang PKL yakni perda nomor 17 tahun 2003. PKL di jalan tentara genie pelajar telah menerima ijin berdagang dan mendapat perlindungan dari lurah setempat. Lurah pada saat orde baru memang masih belum ada Perda yang mengatur tentang PKL. Lurah petemon memanfaatkan adanya PKL di jalan tentara genie pelajar dengan cara membayar. Lurah petemon memanfaatkan PKL karena memiliki kepentingan ekonomi dan mempertahankan kekuasaanya.

PKL yang semakin tahun semakin bertambah membuat pemerintah kota ingin memberdayakan dan menata PKL dengan mengeluarkan perda nomor 17 tahun 2003. Dari Perda nomor 17 tahun 2003 kepentingan dari pemerintah kota Surabaya yang lebih diutamakan daripada PKL. Yang memiliki wewenang dalam penataan PKL adalah camat, satuan polisi pamong praja dan dinas koperasi dan umkm. Tugas mereka jelas di tulis sesuai dengan keputusan walikota nomor 17 tahun 2004. Tugas untuk menata dan memberdayakan PKL-PKL yang ada di Surabaya.

Tugas-Tugas yang tercantum dalam keputusan walikota nomor 17 tahun 2004 ternyata ada yang menyalahkan tugas-tugas tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Di jalan tentara genie pelajar terdapat sistem perijinan yang dilakukan oleh oknum petugas satpol pp. Petugas satpol pp yang seharusnya memberikan peringatan kepada PKL yang bersangkutan untuk membongkar atau memindahkan sarang usaha atau mengeluarkan sendiri barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari lokasi PKL, melakukan pembongkaran sarana usaha atau mengeluarkan barang dagangan PKL dan melakukan penyidikan dalam rangka pengenaan sanksi pidana malah berganti fungsi menjadi pelindung dan pemberi ijin untuk PKL non-resmi di jalan tentara genie pelajar.

Dinas koperasi dan umkm memiliki fungsi memberdayakan PKL dengan cara melakukan pembinaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan PKL. PKL yang telah direlokasi atau PKL yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Surabaya kemudian dibina oleh dinas koperasi dan umkm. Pembinaan ini dilakukan untuk memberdayakan PKL agar PKL dapat membuka usaha, tempatnya sendiri atau dapat mandiri dan tidak berdagang lagi di fasilitas umum. Namun, ada beberapa oknum dinas yang menyalah gunakan fungsi tugasnya dengan memberi perlindungan dan keamanan kepada PKL non-resmi di jalan tentara genie pelajar.

Lurah petemon, oknum dinas koperasi dan umkm, oknum petugas satpol pp yang melindungi dan memerikan keamanan untuk PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar, merupakan hubungan timbal balik dari elit penentu dan massa yang menghendaki penghormatan dan simpati timbale balik tetapi tidak pula ia menghilangkan jarak dan keperluan sikap yang bisa menumbuhkan apresiasi wajar tentang perbedaan-perbedaan mereka dalam tanggungjawab dan kekuasaan. (Keller, 1984: 394)

Camat sawahan merupakan camat yang dapat dibilang terkadang mendukung adanya PKL tetapi terkadang tidak mendukung adanya PKL. Mendukung adanya PKL karena PKL sama-sama mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak sembarangan ditertibkan begitu saja. Ia memiliki solusi sementara dengan untuk PKL makanan di jalan tentara genie pelajar yakni boleh berjualan tetapi pada pagi hingga sore hari. Solusi sementara yang diberikan oleh camat sawahan tentu saja melanggar Perda nomor 17 tahun 2003 dimana dilarang menggunakan fasilitas umum untuk berdagang. Tidak mendukung adanya PKL di jalan tentara genie pelajar karena melanggar aturan hukum yang berlaku dan mengganggu keindahan kota. Ketika ada kerja bakti bersama satuan polisi pamong praja kotamadya di jalan tentara genie pelajar, PKL di jalan tentara genie palajar tidak diberitahukan bahwa ada kerja bakti massal sehingga tepat pada kerja bakti massal banyak PKL di jalan tentara genie pelajar kaget dan menyelamatkan dagangannya. Perilaku camat yang terkadang mendukung dan menolak adanya PKL di jalan tentara genie pelajar merupakan akibat dari pergeseran pemerintahan terpusat menjadi

desentralisasi. Pergeseran dari pemerintahan terpusat menjadi desentralisasi tidaklah mudah di untuk dijalani sehingga menyebabkan aparatur pemerintah seperti camat terkadang sesuai yang di harapkan dan terkadang tidak sesuai yang di harapkan. (Hasibun & Albert, 1995).

Kepentingan Komunitas PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar merupakan kelompok kepentingan karena PKL di jalan tentara genie pelajar adalah massa yang memiliki tuntutan-tuntutan untuk kehidupan mereka. (Ornstein, 1978). Kelompok menjadi suatu aktifitas dari massa, namun ada yang mendorong aktivitas massa yakni kepentingan. (Varma, 1975) Kepentingan adalah perilaku yang dihadapi, menyangkut suatu tuntutan atau tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh satu kelompok atas kelompok-kelompok tertentu dalam suatu sistem sosial (Varma, 1975)

Kepentingan ekonomi seperti tuntutan dan gaya hidup tinggi, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pekerjaan yang sulit didapatkan di Surabaya mengakibatkan PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar bertahan. Tidak hanya kepentingan ekonomi tetapi kepentingan politik juga dipergunakan PKL agar dapat eksis di Jalan Tentara Genie Pelajar. Bermula dari peraturan pemerintah kota Surabaya yang melarang adanya PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar karena adanya larangan berjualan di fasilitas umum. PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar menjadi kebingungan karena semula yang boleh berdagang menjadi dilarang, sehingga PKL-PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar mencari jalan keluar dengan cara membentuk kepengurusan PKL yang mencakup PKL di Jalan Tidar, Jalan Tentara Genie Pelajar, dan Jalan Kalibutih. Kepengurusan PKL memiliki fungsi yakni memperjuangkan nasib PKL yang dilarang berjualan difasilitas umum seperti di Jalan Tidar, Tentara Genie Pelajar, dan Kalibutih. Kepengurusan PKL ini ternyata memiliki fungsi lain jika ada pemilu kepala daerah maka mereka menyalurkan aspirasi kepentingan politik kepada PKL-PKL. Ketika waktu pemilihan sudah dekat para PKL dikumpulkan dan diberi sosialisasi oleh kepengurusan ini untuk memilih calon A yang lebih dekat dengan PKL sehingga PKL dapat terlindungi.

Kepentingan Aparatur Pelakasana

Sebelum adanya perda yang mengatur tentang PKL di Surabaya, PKL di jalan tentara genie pelajar sudah memiliki sistem perijinan yang diberlakukan oleh preman dan lurah petemon. Dengan alasan bahwa PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar telah menggunakan wilayahnya untuk berdagang sehingga lurah petemon yang menikmati kekuasaannya mencoba untuk memanfaatkan PKL dengan cara memerintah dan mengeendalikannya. Cara memerintah dan mengendalikan para PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar dengan cara membayar kepada lurah dengan alasan untuk membayar retribusi sampah.

Lambat laun kota Surabaya mengalami peningkatan-peningkatan yang drastis dalam menata kotanya. Salah satu penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya adalah PKL. Penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dengan mengeluarkan Perda nomor 17 tahun 2003. Kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Surabaya nomor 17 tahun 2004. Sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya nomor 17 tahun 2004 yang berwenang untuk menata dan menertibkan PKL di Surabaya adalah satuan polisi pamong praja, dinas koperasi dan umkm dan camat. Dalam melaksanakan tugas yang telah tercantum dalam Keputusan Walikota ternyata tidak semua aparatur pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik, ada beberapa oknum aparatur pemerintah yang memanfaatkan kewenangan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi.

Penyelewengan tugas yang dilakukan oleh oknum aparatur pemerintah dikarenakan memiliki kepentingan ekonomi, sosial dan politik. Oknum dinas koperasi dan umkm memiliki kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Kepentingan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tuntutan hidup yang tinggi, kepentingan sosial karena mayoritas PKL berasal dari daerah yang sama yakni Madura. Kepentingan oknum petugas satpol pp adalah kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tuntutan hidup yang tinggi, kepentingan politik dimana ketika akan ada pemilihan wakil rakyat seperti pemilihan gubernur, walikota dan sebagainya, oknum petugas satpol pp menyampaikan sarannya untuk memilih calon

A sebagai wakil rakyat karena dianggap lebih berpihak kepada rakyat kecil seperti PKL. Kepentingan camat sawahan adalah kepentingan sosial dan politik. Kepentingan sosial adalah ketika camat melihat PKL sebagai manusia yang sama-sama mencari nafkah untuk kebutuhan hidup, kepentingan politik camat adalah ketika ada pejabat yang mampit kedaerahnya maka daerahnya harus terlihat baik.

Camat, Oknum dinas koperasi dan umkm, oknum petugas satpol pp bagi mereka yang selama ini pemerintahan terpusat kemudian menjadi desentralisasi tidaklah mudah menjalani pemerintahan yang mengalami pergeseran. (Hasibun & Albert, 1995). Sikap aparat pemerintah, saat ini kondisi mereka jauh dari yang diharapkan. (Hasibun & Albert, 1995). Hal ini menyebabkan banyak aparat pemerintah yang terkadang bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan hukum yang berlaku. (Hasibun & Albert, 1995)

Survival PKL: Simbiosis Mutualistik antara PKL, Pemerintah dan Preman

PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar membutuhkan jejaring politik agar dapat melindungi PKL dari penertiban. Jejaring politik yang didapatkan oleh PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar adalah lurah petemon, oknum dinas koperasi dan umkm, dan oknum petugas satpol pp, preman. Ketika orde baru PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar mendapat perlindungan dari lurah petemon dan preman. Ketika Perda nomor 17 tahun 2003 dikeluarkan PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar mendapatkan perlindungan dari oknum petugas satpol pp dan oknum dinas koperasi dan umkm. Dari tahun 2008 hingga sekarang PKL di Jalan Tentara Genie Pelajar mendapatkan perlindungan dan izin dari oknum petugas satpol pp. Perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan keamanan dan memberitahukan beberapa hari sebelumnya jika ada penertiban. Aparatur pemerintah seperti oknum dinas koperasi dan umkm, oknum petugas satpol pp, lurah petemon merupakan elit penentu. Dimana mereka dapat menjadi kuat ketika ia melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjadi lemah disaat mereka memiliki kepentingan. Preman juga merupakan elit penentu karena bisa merekomendasikan antara PKL dan kepengurusannya untuk bekerjasama dengan oknum dinas koperasi dan umkm. Namun, perlindungan yang diberikan

tidaklah gratis, PKL harus memberikan hubungan timbal balik kepada jejaring politik. Hubungan timbal balik tersebut berupa pembayaran yang dilakukan setiap bulan oleh PKL. Disini elit politik seperti lurah, preman, oknum petugas satpol pp, dan oknum dinas koperasi dan umkm dapat disebut juga dengan negara. Negara yang dimaksud adalah negara yang bersifat sekunder yang melakukan apa yang dikehendaki oleh individu atau kelompok karena bisnis dan pemerintahan tidak dapat di pisahkan sehingga terjadilah hubungan timbal balik atau hubungan patron klien antara negara dan kelompok kepentingan. (Caporaso, James, & David, 1992)

KESIMPULAN

Jejaring sosial PKL di jalan tentara genie pelajar berasal dari hubungan sederhana yakni madura dan hubungan pertemanan. Jejaring ekonomi berasal dari preman, lurah petemon, oknum petugas satpol pp, oknum dinas koperasi dan umkm dengan cara membayar setiap bulan. Perlindungan yang didapatkan dengan hubungan patron klien yang dibantu dengan adanya elit penentu. Kewenangan pemerintah kota Surabaya yang begitu besar mengakibatkan oknum dinas koperasi dan umkm, oknum petugas satpol pp memanfaatkan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi tersebut merupakan kepentingan sosial, ekonomi dan politik. Tidak hanya oknum dinas koperasi dan umkm, oknum petugas satpol pp yang memiliki kepentingan tetapi PKL, preman dan lurah juga memiliki kepentingan ekonomi, sosial dan politik. Dengan adanya kepentingan ekonomi, sosial dan politik PKL di jalan tentara genie pelajar memiliki jejaring politik yang berasal dari PKL, oknum petugas satpol pp, preman, lurah petemon dan oknum dinas koperasi dan umkm.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alisjahbana, 2004, *Kebijakan Publik Sektor Informal*, ITS Press, Surabaya
- Caporaso, James A, & David P Levine, 1992, *Teori-teori ekonomi politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Keller, Suzanne, 1984, *Penguasa dan Kelompok*

- Elit*, CV.Rajawali, Jakarta
- Made I, 2006, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Nelson Joan M, 1979, *Access To Power: Politics and The Urban Poor in Developing Nations*. Princeton University Press, New Jersey
- Ornstein, Norman J & Elder Shirley, 1978, *Interest Groups, Lobbying and Policy Making*. Congressional Quarterly INC, Wangshington DC 1
- Syafiie, Kencana Inu, 1994, *Ilmu Pemerintahan*, CV Mandar Maju, Bandung
- Varma SP, 1975, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo, Jakarta
- Widjadja HAW, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Media Cetak
- Kompas, 14 Januari 2010
- Internet
- <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-14164-chapter1pdf.pdf> diakses tanggal 9 novemvber 2012
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah> Diakses tanggal 30 november 2012
- [http// Ivanguستا.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf](http://Ivanguستا.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf) diakses 22 mei 2012
- <http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/362-memahami-sekali-lagi-grounded-research.html>
- <http://www.scribd.com/doc/18793301/Grounded-Research> diakses tanggal 1 desember 2012
- <http://Pedagang Kaki Lima> diakses.pdf tanggal 10 november 1012